



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTIEK SUGIHARTI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **155160**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.374.145.455

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 624.600.000
2. Tanah Seluas 1065 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.374.545.455
5. Tanah Seluas 1421 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 1.421 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 402.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.146.071.200



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.429.296.781
F. HARTA LAINNYA	Rp.	228.000.000
Sub Total	Rp.	15.579.513.436
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.579.513.436

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.